

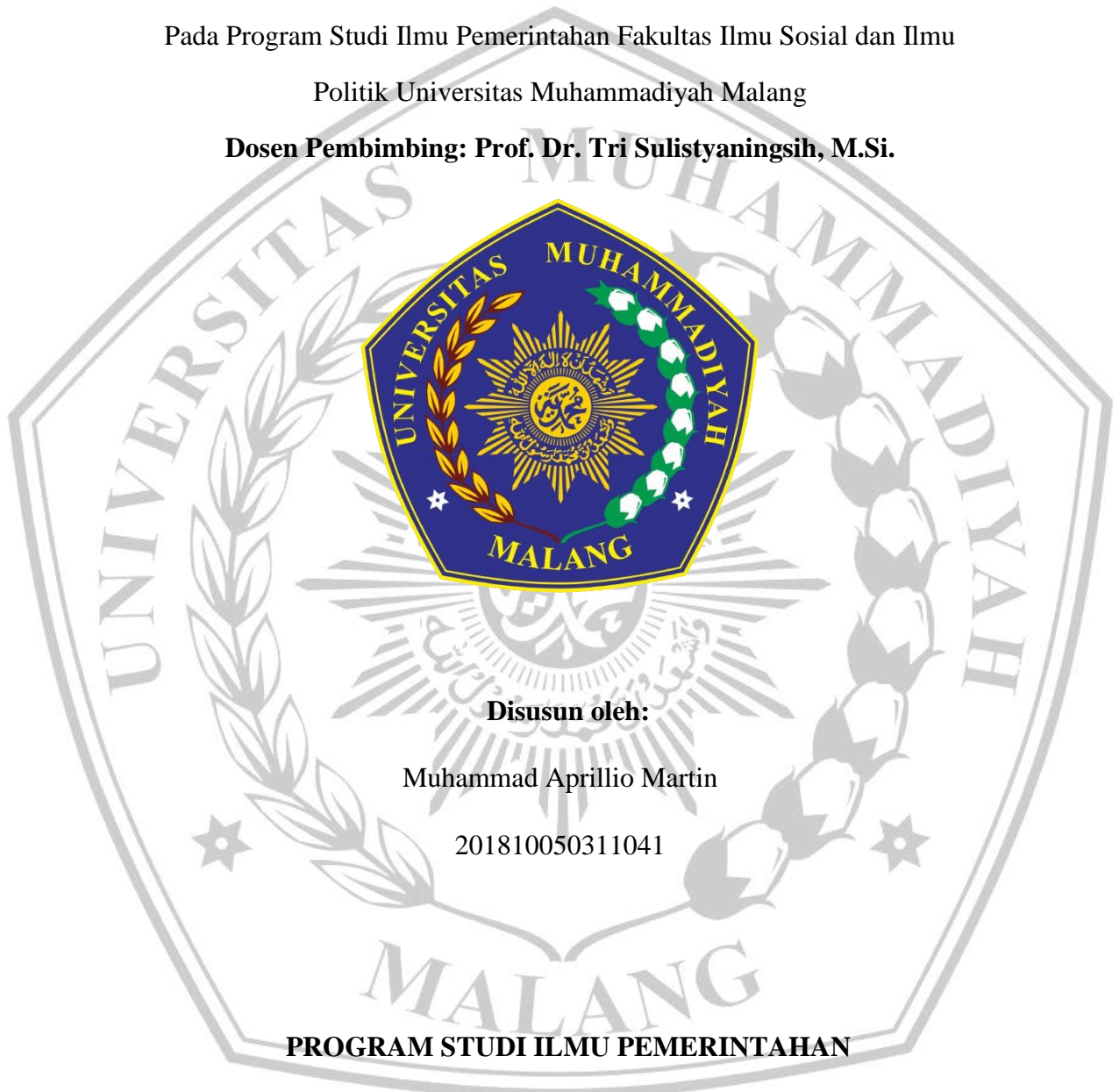
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
DALAM PENINGKATAN USAHA INDUSTRI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF DI KOTA BOGOR**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana (S.IP)

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.



Disusun oleh:

Muhammad Aprillio Martin

201810050311041

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN USAHA INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI KOTA BOGOR

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD APRILLIO MARTIN

201810050311041

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Juma`at / 25 Oktober 2024*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Muhammad Kamil, S.IP., M.A

Pembimbing


Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si.

Mengetahui

FISIP UMM



Najamuddin Hidayat Rival, S.IP., M.Hub.Int.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Aprillio Martin

201810050311041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan

LULUS

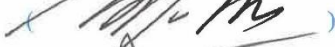

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan

Pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024

Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Asep Nurjaman, M.Si ()
2. Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A ()
3. Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. ()

Wakil getahui
Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Najamuddin Kharis, S.IP., M.Hub.Int.

PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aprillio Martin
NIM : 201810050311041
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM
PENINGKATAN USAHA INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI
KOTA BOGOR adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat
karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di
suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara
tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR
AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS
ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 September 2024

Yang Menyatakan



87273ALX335139402

Muhammad Aprillio Martin



Kampus I

Jl. Bendung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 251 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutani No. 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 562 662

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No. 240 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 491 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa **di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang**. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Aprillio Martin
NIM : 201810050311041
Judul TA/Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor

Pembimbing : Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	10%	10%	12%	5%	3%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd



Malang, 15 Oktober 2024
Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.IP., MA

KATA PENGANTAR

Allahmudlilahi rabbil' alamin, segala rahmat puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor”** dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Tak terlupa salam serta shalwaat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi dan pembuka gerbang cahaya bagi para umatnya hingga akhir masa.

Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mencapai gelar Starata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan, Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penyusun dari pada skripsi ini akan jauh lebih sulit dari pihak yang dijalankan. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Prof Dr, Muslimin Machmud, M Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si.selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan membagi ilmu serta masukan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada penelitian.
5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Pemerintahan dan staff Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu peneliti dalam hal kelancaran proses skripsi.

6. Bapak Ayip Samsul Muarif selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang telah membantu memberi arahan dan pemenuhan pencarian data pada skripsi.
7. Pihak Kementerian Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas A Angkatan 2018 yang telah menemani masa-masa perkuliahan selama di Malang dan terimakasih atas dukungannya selama penulis melakukan pengerjaan skripsi ini.
9. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan membenahi penelitian inidari berbagai pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada diri penulis maupun semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. *Aamin Ya Rabbal'Alaamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 10 September 2024

Muhammad Aprillio Martin

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Definisi Konseptual.....	8
1.6 Kerangka Berfikir.....	11
1.7 Definisi Operasional.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II.....	20
TINJAUAN ATAU KAJIAN TEORI.....	20
2.1 Penelitian Terdahulu	20
2.2 Kajian Teori	27
2.2.1 Pengertian Implementasi Van Meter dan Van Horn	27
2.3 Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	28
2.4 Sektor Ekonomi Kreatif	31
2.5 Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif di Indonesia	32
BAB III.....	34
DESKRIPSI WILAYAH KOTA BOGOR.....	34
3.1 Gambaran Umum Kota Bogor	34
3.1.1 Kondisi Geografis Kota Bogor	34
3.1.2 Kondisi Kependudukan Kota Bogor	35

3.2	Keadaan Pariwisata Kota Bogor	35
3.2.1	Potensi Pariwisata Kota Bogor	35
3.3	Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	38
3.3.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.....	38
3.3.2	Tantangan dan Peluang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	40
BAB IV	42
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	42
4.1	Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor.....	42
4.2	Standar dan Tujuan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	43
4.2.1	Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	43
4.2.2	Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	48
4.3	Sumber Daya Implementasi Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	49
4.4	Aktivitas dalam Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	59
4.5	Organisasi Tata Kelola Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	62
4.6	Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dalam Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	66
4.7	Sikap Para Pelaksana Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	69
4.8	Faktor Penghambat Pariwisata dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	71
4.9	Faktor Pendukung Pariwisata dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	73
BAB V	75
PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.1.1	Kesimpulan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	75
5.1.2	Faktor Penghambat dan Pendukung Pariwisata dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



Muhammad Aprillio Martin, 201810050311041, **Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor**, Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun rumusan masalah ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam peningkatan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif, dimana mampu memberikan gambaran ekonomi kreatif di Kota Bogor. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan standar dan sasaran kebijakan dikatakan sudah terlaksana dengan baik serta sesuai dengan peraturan. Sumber daya manusia sudah memadai. Sumber daya finansial atau pendanaan dikatakan cukup untuk merealisasikan tujuan. Sumber daya saran dan prasarana masih kurang dan masih belum memadai. Karakteristik organisasi mulai dari Kemenparekraf/Baparekraf, Disparbud Kota Bogor dan Reka Kota Bogor. Komunikasi sudah terlaksana dengan baik. Dengan didukung oleh kondisi lingkungan sosial dari pihak komunitas, Kondisi lingkungan ekonomi dapat membantu masyarakat. Dipengaruhi oleh lingkungan politik yang mendukung penuh dari DPRD dan Walikota Bogor. Selanjutnya sikap para pelaksana yang baik berupa penerimaan. Namun terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, memastikan stabilitas politik dan sosial sehingga kurang membantu peningkatan ekonomi kreatif di Kota Bogor.

Kata Kunci :Ekonomi Kreatif, Implementasi, Pariwisata

Muhammad Aprillio Martin, 201810050311041, **Implementation of Tourism Development Policy in Increasing Tourism Industry Business and Creative Economy in Bogor City**, Supervisor: Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Sc.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of policies that have been implemented by the Bogor City Government in developing the tourism sector and creative economy. The formulation of this problem is how the implementation of tourism development policies in increasing the tourism industry and creative economy in Bogor City. The method used in this research uses a descriptive qualitative approach, which is able to provide an overview of the creative economy in Bogor City. With data collection techniques based on the results of observations, interviews, and documentation. The results of the study show that the standards and objectives of the policy are said to be well implemented and in accordance with the regulations. Human resources are adequate. Financial resources or funding are said to be sufficient to realize goals. The resources of advice and infrastructure are still lacking and still inadequate. Organizational characteristics ranging from Kemenparekraf / Baparekraf, Disparbud Bogor City and Reka Bogor City. Communication has been done well. Supported by social environmental conditions from the community, economic environmental conditions can help the community. Influenced by a political environment that fully supports the DPRD and the Mayor of Bogor. Furthermore, the attitude of the implementers is good in the form of acceptance. However, there are obstacles in the form of low community participation, ensuring political and social stability so that it does not help increase the creative economy in Bogor City.

Keywords: Creative Economy, Implementation, Tourism

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baykhaqi, E., Yasintha, N., & Winaya, K. (n.d.). (2022). "Implementasi program tempat olah sampah setempat (toss) dalam menunjang industri ekonomi kreatif guna pemenuhan kebutuhan listrik di kabupaten klungkung". Hlm 31-42.
- Ahnaf Adjani, M., Ramadhan, R., Saputra, A., & Nabila, G. (2023). "The potential of creative economy in reducing unemployment in the city of bogor". 1, 1-1.
- Akil, N., Lpi Makassar, S., & Bung, J. (n.d.). (2021). "STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN WAJO.
- Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). "Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City". *PERSPEKTIF*, 11(2), 451-459.
- Devi, N. U. K., Oktafiyanto, O., Dewi, J. K., Sayyidi, A. M. A. G., & Anam, A. (2022). "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Ekonomi Kreatif Produk Abon Bawang Goreng Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo". *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 352-359.
- Evaluasi Kinerja Kebijakan Sektor Pariwisata dalam mendukung Kota Serang sebagai Kota Kreatif*. (n.d.).
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). "Model implementasi kebijakan van meter dan van horn dalam tinjauan pembangunan jalan lingkar selatan (*ring road*) di kabupaten tuban". *Journal Publicuho*, 4(2).
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). "Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern". 05(04), 16737-16747.
- Hak, P. P., Merek, A., Nurwati, S., & Gilalo, J. J. (2024). "Potential protection of trademark rights for culinary sector business actors in the city of bogor". In *Jurnal Ilmiah Living Law*" (Vol. 16, Issue 2).
- Henri Kusnadi, I., & Furqoni, W. (2021). "Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang". (Vol. 3, Issue 1).
- Innuuridz Wahid, M., Kusumastuti Hardjono, R., Bennet, S., & Russell, R. (2021). "Analisis *Knowledge Acquisition* pada Bisnis Kuliner di Kota Bogor Suggested Citation". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. (Vol. 8, Issue 1).
- Kebijakan, I., Angkutan, T., Jenis, U., Penumpang, M., Di, U., Semarang, K., Rizqi, A., & 1*, I. (2017). Economics Development Analysis Journal Info Artikel. In *Economics Development Analysis Journal* (Vol. 6, Issue 1).

- Kecamatan Bogor, D. I., Kota, S., Skripsi, B., Sarjana, G., Oleh, A. P., & 1810180, N. D. (n.d.). “Partisipasi masyarakat dalam pengembangan program ekonomi kreatif novita mayla safitri”.
- Komarudin, A. (2022). “Penguatan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Melalui Inovasi Produk Sampo Kendaraan Sofie Cleaner”. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 65–69.
- Lestari, N. S., & Suyaman, D. J. (2024). “Implementasi Strategi Pemerintah Kota Bogor Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Kota Ramah Keluarga”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 742–745.
- Lestari, S. D., Duryatmo, S., & Adinugroho, P. (2021). “Strategi marketing public relations dinas pariwisata dan kebudayaan kota bogor dalam memperkenalkan batik bogor”. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 5(1), 11–18.
- Listari, S., Hendry Fahsani, D., & Marlina Marselina, S. (n.d.). (2019) “Pelatihan Ekonomi Kreatif Bagi UMKM Di Kota Bogor”. 23–30.
- Malihah, N., & Islam Indonesia, U. (n.d.). Peran Ekonomi Kreatif Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Bambu Siti Achrira”.
- Marpaung, H. (2000). *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: gamedia.
- Salah Wahab. 1988. “Manajemen Kepariwisata”.
- Mofida, I., Program Magister Ilmu Sosial Fisip Untan, M., & Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Untan, F. (2021). “Implementasi Program Pembangunan Kkhatulistiwa Park Pada Kawasan Wisata Tugu Khatulistiwa Di Kota Pontianak”. In *Journal of Public Administration and Sociology of Development* (Vol. 2, Issue 1).
- Nurhuala Huddin, M., Manajemen, N., Serang Raya, U., & author Nurhuala Huddin, C. M. (2021). “Pendampingan peningkatan ekonomi kreatif kelurahan pabuaran kecamatan walantaka kota serang melalui implementasi kano model dan e-commerce”.
- Octabelina, R. (2021). “Peran Promosi dan Pemerintahan Provisisi Jawa Barat Bagi Perkembangan Bisnis Pariwisata”. *MANNERS Management and Entrepreneurship Journal*, 4(2).
- Oktarina Sopacua, I., Primandaru, N., & Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, S. (2020). “Implementasi Quadruple Helix Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif”. *Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2).
- Pariwisata, D., Kebudayaan, D., & Bogor, K. (n.d.). “RENJA RENCANA KERJA TAHUN 2020”.

- Pembangunan, R., Daerah, J. P., Menengah, J., Dan, D., Kerja, R., & Daerah, P. (n.d.). (2021). “Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan”. 129 – 130.
- Pengembangan, S., Halal, W., Hariani, D., & Dinitri, S. (n.d.). (2024). *Hariani, et* “Strategi pengembangan wisata halal kota bogor dengan mengoptimalkan industri kreatif”. 69 (1), 154 - 166.
- Perencanaan, T., Dan Evaluasi, I., Subianto, A., & Si, M. (n.d.). (2005) *KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Rahmawati, R., & Djuanda Bogor, U. (2024). *Ekonometrika: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan* <https://journalpedia.com/1/index.php/jiet> *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG WISATA* (Vol. 4, Issue 2). <https://journalpedia.com/1/index.php/jiet>
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54.
- Riswanto, I., Subiyanto, A., & Rianto, B. (2019). “Implementation of corporate social responsibility program in Gresik petrochemical”. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 85(1), 497–506.
- Rofingatun Khasanah, U., & Agus Santosa, S. (n.d.). “IMPLEMENTASI COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI DESA WISATA TINALAH KABUPATEN KULON PROGO”. In *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* (Vol. 2, Issue 1).
- Suryanti Nengsih, N., Usman Siam, N., Ferizone, F., Rasid, D., Ramdani, Y., & Normala, A. (2023). “Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 1231–1254.
- Tri Ramdani, F., Apriliani, A., Yuniar Anisa Ilyanawati, R., Virly Apriliyani, N., Putri Ramadanti, N., Pratami, M., & Studi Administrasi Publik, P. (n.d.). “Implementasi kebijakan peraturan wali kota bogor nomor 55 tahun 2020 tentang pelestarian budaya sunda *implementation of bogor mayor regulation number 55 of 2020 concerning the preservation of sunda culture*”.
- van Meter, D. S., & van Horn, C. E. (1975). “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wardana, I. M. N. H. W., & Larantika, A. A. A. D. (2022). “Analisis Kebijakan Kawasan Gunung Batur di Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menjadi *Global Geopark Network (GGN)*”. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 89–94.
- Widi Lestari, A., Gisela Mburu Amma, & Firman Firdausi. (2024). “Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu)”. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 62–70.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- e. bahwa . . .

Lampiran 2:

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program prioritas merupakan program-program yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Bab sebelumnya telah menampilkan daftar program-program prioritas berikut keterkaitannya dengan sasaran yang dituju.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Walikota dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Bagi program prioritas I, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan Walikota pada tingkat kebijakan.

Pada periode 2015-2019, prioritas I Kota Bogor mencakup enam bidang meliputi:

1. Penataan transportasi dan angkutan umum;
2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota;
3. Penataan dan pemberdayaan PKL;
4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya;
5. transformasi budaya dan reformasi birokrasi; dan
6. Penanggulangan kemiskinan. Masing-masing dari keenam bidang prioritas ini kemudian dijabarkan menjadi berbagai program, baik sebagai program prioritas (yang berkorelasi langsung dengan pencapaian enam bidang prioritas), program wajib (program-program untuk memenuhi dan melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah), maupun program rutin yang menjadi pendukung. Program-program tersebut, berikut pendanaan indikatifnya disajikan pada tabel berikut.

Lampiran 3 :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Peternakan dan Perikanan	Jumlah Produk Olah Hasil Peternakan yang dibina Dinas	5	7		10		13		16		19		19	
	Jumlah Produk Olah Hasil Perikanan yang dibina Dinas	9	10		15		20		25		30		30	
	Jumlah komoditas yang dipasarkan di STA	4	6		8		10		12		14		14	
	Jumlah Produk yang dipasarkan di Pasar Tani	10	15		20		25		30		35		35	
	Jumlah komoditas Perikanan yang dipasarkan di depo ikan hias	20	22		24		26		28		30		30	
	Jumlah komoditas Perikanan yang dipasarkan di Depo Pemasaran Hasil Perikanan (Fishmart)	0	20		25		30		35		40		40	
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan	60	25	244	25	251	26	259	26	267	26	275	128	Kantor Ketahanan Pangan
PARIWISATA														
Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	16	16	2.652	17	2.731	17	2.813	18	2.898	18	2.985	18	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusanantara	3.769.787	4.146.766		4.561.442		5.017.586		5.519.345		6.071.280		6.071.280	
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	183.807	202.187		222.406		244.647		269.111		296.023		296.023	
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	0.5	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	1
	Jumlah Hotel berfasilitas MICE	6 hotel	1		2		2		2		2		2	14
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah event/pameran yang diikuti (kali per tahun)	6	7	1.469	7	1.513	8	1.558	8	1.605	8	1.653	8
Badan promosi pariwisata daerah yang terbentuk		Belum ada	Ada	-	ada	-	ada		ada		ada		1	

Lampiran 4 :



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 9 Tahun 2016

Seri E Nomor 5

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2025**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 9 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003

Lampiran 5 :



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL
TAHUN 2010 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010-2025.

BAB I . . .

Lampiran 6 :



**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.212, 2019 KESRA. Ekonomi Kreatif (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6414)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif;

www.peraturan.go.id

Lampiran 7 :

www.hukumonline.com

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

1 / 35

Lampiran 8 :

Dokumentasi Foto Penelitian.

	
<p>Wawancara dengan bapak Ayip Samsul Muarif selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor</p>	<p>Sesi wawancara bersama Bapak Ayip Samsul Muarif, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.</p>
	
<p>Kegiatan Wawancara dengan Komunitas Reka Kota Bogor</p>	<p>Diskusi dengan Komunitas Reka Kota Bogor</p>